

***DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN  
KOTA MALANG***

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2025**

***DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN  
KOTA MALANG***

**SKRIPSI**

Dibuat sebagai salah syarat untuk menyelesaikan studi S1  
pada Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Islam Malang

Oleh:

**ANIF DIYAN FIRMANSYAH**  
**NPM 22101091034**

**Pembimbing Utama**  
**Dr. Hayat, S,AP., M.Si**

**Pembimbing Pendamping**  
**Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP.**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2025**

## RINGKASAN

Anif Diyan Firmansyah, 2025.22101091034, *Dynamic Governance Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun Kota Malang*, Dr. Hayat, S.AP., M.Si, Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP. 29128. xvi. 154

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Malang yang menimbulkan persoalan tata ruang dan ketertiban, namun tetap berperan penting dalam perekonomian masyarakat kecil. Pemerintah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) berupaya menata sektor ini dengan mengacu pada konsep *dynamic governance* yang menekankan kemampuan berpikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir ulang (*thinking again*), dan berpikir lintas sektor (*thinking across*).

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, karena pendekatan ini dianggap mampu menggali makna, pengalaman, dan interaksi para aktor yang terlibat secara mendalam. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Diskopindag, serta perwakilan PKL, dan disertai observasi lapangan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara interaktif, serta diverifikasi melalui triangulasi untuk menjaga keabsahan temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *dynamic governance* dalam pengelolaan PKL di Alun-Alun Kota Malang mulai terlihat melalui tiga aspek utama: perencanaan relokasi jangka panjang (*thinking ahead*), perubahan pendekatan dari penertiban ke pembinaan yang lebih humanis (*thinking again*), dan koordinasi lintas instansi dalam penataan kawasan (*thinking across*). Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terkendala kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi, belum terbangunnya sistem data terpadu, dan minimnya partisipasi masyarakat.

Kesimpulannya, penerapan *dynamic governance* di Kota Malang telah mengarah pada tata kelola yang adaptif dan kolaboratif, meski masih menghadapi kendala struktural dan sosial. Penguatan sistem informasi, komunikasi publik, dan keterlibatan aktif PKL diperlukan agar pengelolaan sektor informal menjadi lebih tertib, inklusif, dan berkelanjutan.

**Kata kunci :** *Dynamic governance*, Pedagang Kaki Lima (PKL), Alun-Alun Kota Malang,

## SUMMARY

Anif Diyan Firmansyah, 2025, 22101091034, ***Dynamic Governance in the Management of Street Vendors in the Alun-Alun Area of Malang City***, Dr. Hayat, S.AP., M.Si., Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP. 29128. xvi. 154

---

*This study is motivated by the increasing activity of street vendors (PKL) in the Alun-Alun area of Malang City, which has created spatial and public order issues but still plays an important role in the local economy. The government, through the Department of Cooperatives, Industry, and Trade (Diskopindag), seeks to manage this sector by applying the concept of dynamic governance, which emphasizes the ability to think ahead (thinking ahead), think again (thinking again), and think across sectors (thinking across).*

*The research employs a descriptive qualitative method, as this approach is considered capable of exploring the meanings, experiences, and interactions of the actors involved in depth. Data were collected through in-depth interviews with Diskopindag officials and representatives of street vendors, complemented by field observations and documentation. The data were analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing carried out interactively, and verified through triangulation to ensure the validity of the findings.*

*The results indicate that the application of dynamic governance in managing street vendors in the Alun-Alun area of Malang City has begun to manifest through three main aspects: long-term relocation planning (thinking ahead), a shift in approach from enforcement to more human-centered guidance (thinking again), and inter-agency coordination in area management (thinking across). However, implementation has not been fully optimal due to limited socialization, weak coordination, the absence of an integrated data system, and low public participation.*

*In conclusion, the implementation of dynamic governance in Malang City has moved toward adaptive and collaborative governance, although it still faces structural and social challenges. Strengthening information systems, public communication, and active participation of street vendors are needed to ensure that informal sector management becomes more orderly, inclusive, and sustainable.*

**Keywords:** *Dynamic governance, Street Vendors, Alun-Alun of Malang City,*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Proses urbanisasi ini terjadi secara konsisten setiap tahunnya, didorong oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi perkotaan, peluang kerja yang dianggap lebih besar di kota, serta harapan akan peningkatan kualitas hidup. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2018, persentase penduduk perkotaan mencapai 55,84% atau sekitar 147 juta jiwa. Angka ini terus meningkat menjadi 56,7% pada tahun 2020 (Hadijah dan Sadali, 2020). Tren ini mengindikasikan bahwa lebih dari setengah populasi Indonesia kini tinggal di wilayah perkotaan. Namun, urbanisasi yang berlangsung cepat ini tidak selalu berjalan seiring dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Menurut Kuciswara *et al.* (2021), urbanisasi yang tidak terkendali justru dapat memperparah masalah sosial-ekonomi, seperti meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan perkotaan, serta tekanan terhadap infrastruktur dan layanan publik.

Keterbatasan lapangan kerja di sektor formal menjadi salah satu penyebab utama bergesernya mata pencaharian masyarakat ke sektor informal. Sektor ini mencakup berbagai jenis pekerjaan seperti buruh harian, pekerja rumah tangga, pengemudi ojek, hingga pedagang kaki lima (PKL). Karakteristik utama sektor informal adalah tidak adanya kontrak kerja formal, minimnya perlindungan sosial, serta pendapatan yang cenderung fluktuatif (Rohmah, 2022). Meski memiliki



kerentanan ekonomi yang tinggi, sektor informal memiliki peran vital dalam menyerap tenaga kerja yang tidak terserap sektor formal karena keterbatasan modal, keterampilan, atau tingkat pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Sibagariang *et al.* (2023), sektor ini menjadi jalur alternatif bagi masyarakat untuk tetap memperoleh penghasilan, dengan syarat masuk yang relatif mudah dan modal yang tidak besar. Dalam konteks ini, PKL menjadi salah satu pelaku utama yang secara langsung berkontribusi terhadap dinamika ekonomi lokal. Keberadaan mereka tidak hanya menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, tetapi juga menciptakan sirkulasi ekonomi di tingkat mikro, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah (Octaviani dan Puspitasari, 2022).

Fenomena tersebut juga terjadi di Kota Malang, khususnya di kawasan Alun-Alun yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan rekreasi. Posisi Alun-Alun yang strategis di pusat kota menjadikannya magnet bagi warga lokal maupun wisatawan, baik untuk berbelanja, bersantai, maupun mengakses fasilitas publik di sekitarnya. Tingginya arus pengunjung ini menjadi peluang bagi PKL untuk memasarkan produk mereka. PKL, sebagai bentuk usaha mandiri yang berorientasi pada keuntungan, memainkan peran penting dalam menyediakan lapangan kerja dan akses ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah (Octaviani dan Puspitasari, 2022). Dengan modal kecil dan prosedur yang sederhana, usaha PKL menjadi alternatif menarik bagi masyarakat miskin perkotaan untuk memperoleh penghasilan. Selain itu, PKL turut menggerakkan roda perekonomian lokal melalui perputaran barang dan jasa sehari-hari, serta

memperkuat rantai pasokan informal yang melibatkan produsen kecil, petani, hingga penyedia bahan baku.

Para pedagang jalanan memiliki cara unik dalam menjalankan bisnis mereka untuk mencapai keuntungan. Mereka berperan sebagai pemimpin tunggal yang mengelola seluruh aspek usaha, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengendalian bisnis. Menariknya, kemampuan manajerial ini sering kali tidak diperoleh melalui pendidikan formal, melainkan berdasarkan pengalaman langsung yang mereka pelajari sendiri. Bisnis yang dijalankan oleh para eksekutif sangat bergantung pada pengalaman dan pola pikir mereka, yang membentuk pola pikir mereka terhadap bisnis di tingkat manajerial. Hal ini dikenal sebagai proses pengumpulan informasi. Kemampuan manajerial sangat penting bagi PKL untuk mengembangkan usaha mereka lebih lanjut. Selain itu, inspirasi juga memiliki peran krusial dalam membangkitkan semangat para pedagang untuk mengelola dan mengembangkan organisasi mereka (Dzaky *et al.*, 2024).

Alun-Alun Kota Malang merupakan salah satu ruang publik strategis yang memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas masyarakat, baik untuk kegiatan ekonomi, sosial, maupun rekreasi. Menurut Larasati, (2021) Alun-Alun Kota Malang memiliki peran penting sebagai ruang publik yang multifungsi, salah satunya adalah sebagai tempat untuk kegiatan PKL. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Larasati, (2021) ini dijelaskan bahwa keberadaan PKL di Alun-Alun Kota Malang tidak hanya mencerminkan aktivitas ekonomi informal masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika sosial dan budaya kota. Alun-Alun dipilih karena lokasinya yang strategis, berada di pusat kota dan dekat

dengan fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan kawasan perkantoran, sehingga menjadikannya titik keramaian yang sangat potensial bagi para PKL untuk berjualan. Para pedagang memanfaatkan tingginya arus pengunjung untuk menjajakan berbagai barang dagangan, mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga mainan anak-anak.

Penempatan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Malang menimbulkan sejumlah permasalahan. Salah satu yang paling menonjol adalah gangguan terhadap ketertiban dan keindahan kota. Para PKL seringkali menggunakan badan jalan dan trotoar secara ilegal, sehingga menghambat arus lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki. Selain itu, keberadaan mereka juga berdampak pada kebersihan lingkungan dan mengurangi nilai estetika kawasan publik. Pemerintah Kota Malang telah melakukan berbagai upaya penataan, mulai dari pendekatan persuasif hingga penertiban, namun masih menghadapi tantangan besar karena tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor informal ini sebagai mata pencaharian utama.

Alasan PKL memilih lokasi Alun-Alun Kota Malang karena belum tersedianya tempat relokasi yang memadai dan strategis, serta kurangnya dukungan fasilitas seperti tempat sampah, penerangan, dan sistem drainase yang baik (Larasati, 2021). Oleh karena itu, jika Alun-Alun tetap dijadikan sebagai tempat bagi PKL, diperlukan strategi penataan yang komprehensif, berbasis pada kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Pendekatan partisipatif yang melibatkan PKL dalam proses perencanaan sangat penting untuk menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Alfiyan,



Afifuddin, & Hayat (2025) bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam program KOTAKU mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan infrastruktur dasar dan rehabilitasi permukiman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang tahun 2023, jumlah pedagang di Kota Malang tercatat sebanyak 11.327 orang dengan total 17.347 unit tempat usaha yang tersebar di lima kecamatan. Kecamatan Klojen menjadi wilayah dengan jumlah tempat usaha dan pedagang terbanyak, yaitu 8.047 unit usaha dan 4.535 pedagang. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Klojen merupakan pusat aktivitas ekonomi sekaligus lokasi strategis yang menjadi sentra perdagangan, termasuk di kawasan Alun-Alun Merdeka.

Perluasan jumlah PKL di kawasan Alun-Alun Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin meningkat. Berdasarkan hasil pantauan media serta laporan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, jumlah PKL yang beraktivitas di kawasan Alun-Alun Merdeka tercatat melebihi 100 orang (Radar Malang, 2025). Padahal, kawasan ini secara resmi telah ditetapkan sebagai zona bebas dari aktivitas perdagangan kaki lima. Pada hari-hari biasa, jumlah PKL memang tidak sampai ratusan, namun kehadiran mereka tetap menimbulkan gangguan, baik terhadap kelancaran lalu lintas maupun terhadap estetika kawasan kota. Upaya penertiban secara berkala telah dilakukan oleh Satpol PP. Namun demikian, masih banyak PKL yang tetap nekat berjualan, khususnya di area taman dan zona bermain anak (*playground*), yang menjadi titik favorit para pedagang.

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang, Mustaqim menjelaskan bahwa kawasan Alun-Alun Merdeka sebelumnya telah berhasil disterilkan dari aktivitas PKL. Akan tetapi, saat momentum libur Lebaran 2025, jumlah pedagang kembali meningkat drastis hingga mencapai sekitar 250 orang. Para PKL tersebut tersebar di berbagai titik strategi, seperti "sepanjang sisi barat dekat Masjid Jami', sisi Jalan Merdeka Selatan, hingga area tengah antara Jalan Merdeka Selatan dan Merdeka Barat" Pernyataan tersebut dijelaskan Mustaqim dalam pemberitaan Memontum.com (2025) yang berjudul "PKL di Alun-Alun Merdeka Membludak, Satpol PP Kota Malang Rencanakan Imbauan Persuasif dan Operasi". Mustaqim juga menegaskan bahwa sebagian pedagang memang telah mematuhi imbauan petugas yang disampaikan secara persuasif, namun tidak sedikit yang tetap membandel dan memilih untuk berjualan di kawasan yang dilarang.

Pemerintah Kota Malang, melalui Satpol PP dan Diskopindag, melakukan penertiban dengan memberikan imbauan persuasif di akhir pekan dan merencanakan tindakan tegas berupa penegakan peraturan daerah jika PKL belum mengosongkan area pada tenggat waktu yang ditetapkan. Penegakan ini berlandaskan pada Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penataan dan Pembinaan PKL yang menetapkan kawasan Alun-Alun sebagai zona bebas PKL, serta Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang melarang kegiatan mengganggu ketertiban umum di ruang publik. Selain itu, ketentuan ini juga selaras dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 yang menegaskan prinsip penataan PKL berdasarkan ketertiban,

kebersihan, dan kenyamanan, serta UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur pemanfaatan ruang publik secara tertib.

Meskipun tidak terdapat izin resmi bagi PKL untuk berjualan di kawasan tersebut, kehadiran mereka dianggap menjawab kebutuhan para pengunjung akan jajanan dan minuman ringan. Namun, pemerintah tetap menegaskan bahwa tidak ada dispensasi hukum untuk aktivitas tersebut dan penertiban tetap dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Di sisi lain, muncul dorongan dari DPRD Kota Malang untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang mewajibkan kawasan Alun-Alun bebas dari PKL, agar dapat mengakomodasi penataan yang lebih realistis dan memberi dasar hukum bagi pengelolaan PKL secara layak dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan penataan PKL tidak hanya menyangkut aspek ketertiban, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang perlu dikelola secara adaptif dan kolaboratif.

Menurut Rifai *et al.* (2025), penerapan *good governance* dapat diwujudkan melalui optimalisasi kualitas pelayanan publik yang mencakup lima dimensi utama yaitu bukti fisik (*tangible*), keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*). Jika kelima dimensi ini diimplementasikan secara konsisten, pemerintah daerah dapat menciptakan pelayanan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan PKL, dimensi-dimensi ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk menyusun strategi penataan yang

tidak hanya mengatur ruang fisik, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan.

Sejalan dengan itu, konsep *dynamic governance* semakin penting untuk diterapkan di instansi pemerintah sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi jangka panjang di Indonesia. Jika pada tahap awal reformasi birokrasi pemerintah berorientasi pada *performance-based bureaucracy* (birokrasi berbasis kinerja) sejak 2019, maka pada tahun 2025 arah kebijakan berkembang menuju tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis (*dynamic governance*). Konsep ini menekankan kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan, program publik, serta cara pelaksanaannya agar tujuan jangka panjang tetap tercapai secara efektif. Model tata kelola dinamis ini telah berhasil diterapkan di Singapura, yang mampu membawa negara tersebut menuju pelayanan publik yang unggul melalui kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran pemimpin yang mengatur dan mengawasi mengatur tatanan pelayanan yang telah dibuat untuk dilaksanakan, karena peran pemimpin sangat mempengaruhi keberlangsungan dan efektivitas penerapan kebijakan (Nurhidayah *et al.*, 2019).

Dalam konteks reformasi birokrasi Indonesia, *dynamic governance* menjadi referensi utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Neo dan Chen dalam Rizki *et al.* (2023) menjelaskan bahwa teori *dynamic governance* dapat dijadikan kerangka konseptual utama dalam menganalisis bagaimana tata kelola PKL dapat dilakukan secara adaptif, responsif, dan berkelanjutan oleh pemerintah kota. Teori ini

menekankan bahwa tata kelola yang baik bukan hanya berfokus pada regulasi yang statis, melainkan pada kemampuan pemerintah untuk terus belajar (*think ahead*), meninjau ulang kebijakan (*think again*), dan menyesuaikan implementasi secara fleksibel dengan belajar dari pengalaman pihak lain (*think across*).

*Thinking ahead* (berpikir ke depan) adalah kemampuan organisasi untuk memahami bagaimana masa depan dapat memengaruhi organisasi. Hal ini mencakup kemampuan untuk membuat kebijakan yang dapat menghadapi tantangan potensial di masa depan serta mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Dengan kata lain, pemerintah perlu terus belajar dan mengantisipasi perkembangan di masa depan untuk merumuskan kebijakan yang relevan.

*Thinking again* (berpikir ulang) merujuk pada perubahan lingkungan yang cepat dapat membuat kebijakan yang ada menjadi tidak efektif, bahkan jika telah dipilih dengan cermat. Oleh karena itu, organisasi publik perlu secara berkala meninjau ulang (*thinking again*) kebijakan dan program yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menguji apakah kebijakan tersebut masih relevan dengan kebutuhan jangka panjang organisasi, dan jika tidak, kebijakan tersebut harus direvisi. Hal ini menekankan pentingnya berpikir ulang kebijakan untuk memastikan efektivitasnya.

*Thinking across* (berpikir lintas batas) menjelaskan, dalam menghadapi perkembangan pengetahuan yang baru, organisasi perlu terus belajar dan berinovasi. *Thinking across* berarti mencari ide-ide dan praktik-praktik terbaik dari organisasi lain yang dapat disesuaikan dan diterapkan dalam lingkungan

organisasi sendiri. Ini mencerminkan perlunya menyesuaikan implementasi secara fleksibel dengan belajar dari pengalaman orang lain.

Studi sebelumnya yang dilakukan di Kota Pasuruan mengungkapkan bahwa pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun mengalami berbagai tantangan serius. Beberapa di antaranya mencakup lemahnya koordinasi lintas sektor antara instansi pemerintah terkait, seperti Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan pengelola ruang publik, yang menyebabkan kebijakan penataan tidak berjalan secara optimal (Larasati *et al.*, 2021). Selain itu, ketidaktegasan dalam penegakan aturan serta minimnya pelibatan komunitas PKL dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan turut memperburuk ketertiban dan keteraturan di ruang publik tersebut. Penataan lapak yang tidak terstandar, penggunaan trotoar secara ilegal, serta sirkulasi pedagang yang tidak terkendali menimbulkan kesan semrawut dan mengurangi kenyamanan pengunjung maupun pengguna jalan.

Fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan PKL bukan hanya persoalan teknis-spasial, tetapi juga erat kaitannya dengan tata kelola yang responsif, partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi setempat. Mengacu pada konteks tersebut, Kota Malang sebagai kota besar yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi informal yang tinggi, khususnya di kawasan Alun-Alun sebagai ruang publik utama, juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penertiban dan penataan, permasalahan terkait keberadaan PKL di Alun-Alun Kota Malang tetapi belum sepenuhnya terselesaikan.



Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan baru dalam pengelolaan PKL yang tidak hanya bersifat regulatif dan administratif, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola dinamis (*dynamic governance*). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk berpikir ke depan (*think ahead*), mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan secara berkala (*think again*), serta belajar dari praktik terbaik lintas sektor dan wilayah (*think across*). Dalam konteks pengelolaan PKL, pendekatan *dynamic governance* menjadi sangat relevan untuk diterapkan.

Pengelolaan PKL di Alun-Alun Kota Malang memerlukan strategi yang tidak hanya mengatur aspek fisik seperti relokasi atau penyediaan fasilitas perdagangan, tetapi juga memperhatikan aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola PKL sangat dipengaruhi oleh kebijakan komunikasi yang efektif, alokasi sumber daya yang memadai, serta pendekatan berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, penerapan *dynamic governance* dapat menjadi solusi inovatif untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi informal PKL dan kepentingan tata ruang kota.

Sebagai salah satu kawasan strategis di pusat Kota Malang, Alun-Alun Merdeka memiliki status sebagai zona steril yang seharusnya terbebas dari aktivitas PKL. Namun, dalam praktiknya, area ini masih menjadi titik favorit bagi PKL untuk berjualan, terutama karena tingginya kunjungan masyarakat dan wisatawan. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskopindag) sebenarnya telah melakukan upaya penataan dengan pendekatan persuasif, yaitu mengurangi penertiban yang bersifat represif dan lebih

menekankan pada pengaturan zonasi. PKL diarahkan untuk berjualan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona produktif, seperti di sekitar Pasar Besar atau Jalan Ade Irma Suryani, yang dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi dan tidak mengganggu ketertiban ruang publik.

Namun, agar solusi ini benar-benar efektif, pendekatan yang digunakan perlu disesuaikan dengan prinsip *dynamic governance*. Pertama, melalui *think ahead*, pemerintah perlu mengantisipasi meningkatnya jumlah PKL di masa depan, terutama pada hari-hari besar, akhir pekan, dan momentum tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang kebijakan jangka panjang berupa penyediaan sentra kuliner atau ruang usaha informal yang terintegrasi dengan pariwisata kota, sehingga kebutuhan ekonomi PKL tetap dapat terakomodasi tanpa mengganggu fungsi Alun-Alun sebagai ruang publik steril.

Kedua pendekatan dengan *think again*, kebijakan zonasi dan relokasi yang sudah diterapkan perlu dievaluasi secara berkala, misalnya dengan menilai apakah lokasi alternatif yang disediakan benar-benar mampu menarik pembeli dan memberikan keuntungan yang layak bagi PKL. Jika kebijakan tersebut tidak berjalan efektif, pemerintah perlu melakukan penyesuaian, seperti menambah fasilitas pendukung, melakukan promosi lokasi baru, atau memberikan insentif bagi PKL yang bersedia pindah.

Ketiga, melalui *think across*, pemerintah dapat belajar dari praktik terbaik kota lain yang berhasil menata PKL secara berkelanjutan, misalnya melalui model penataan berbasis komunitas, digitalisasi sistem perizinan, atau skema kemitraan dengan swasta dalam penyediaan sarana usaha. Pendekatan lintas sektor ini juga

melibatkan komunitas PKL, LSM, serta akademisi agar solusi yang diterapkan tidak hanya *top-down*, melainkan partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan penerapan prinsip *dynamic governance* tersebut, pengelolaan PKL di Alun-Alun Kota Malang tidak hanya berfokus pada aspek penertiban dan pengaturan ruang, tetapi juga memperhatikan pemberdayaan ekonomi, pelibatan masyarakat, serta keberlanjutan kebijakan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan tata ruang kota dan kebutuhan hidup masyarakat kecil yang bergantung pada sektor informal.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan konsep *dynamic governance* dalam pengelolaan pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun Kota Malang?
2. Bagaimana tantangan terhadap penerapan konsep *dynamic governance* dalam pengelolaan pedagang kaki lima di Alun – alun Kota Malang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan konsep *dynamic governance* dalam pengelolaan pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun Kota Malang
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dalam penerapan konsep *dynamic governance* pada pengelolaan pedagang kaki lima di Alun- alun Kota Malang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian :

1. Bagi Pedagang Kaki Lima : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya keterlibatan aktif PKL dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan mereka. Melalui pendekatan *dynamic governance*, PKL diharapkan memperoleh pengakuan atas peran ekonominya, akses terhadap fasilitas dan perlindungan yang lebih layak, serta lingkungan usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan.
2. Bagi Masyarakat Umum: Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan fungsional bagi masyarakat umum. Dengan terciptanya keseimbangan antara aktivitas ekonomi informal dan fungsi sosial ruang publik. Masyarakat akan merasakan manfaat berupa kenyamanan, keamanan, dan peningkatan estetika kota.
3. Bagi Akademisi dan Dunia Pendidikan: Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian tata kelola perkotaan, khususnya pengelolaan sektor informal melalui pendekatan *dynamic governance*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur studi kebijakan publik, perencanaan kota, dan administrasi pemerintahan yang adaptif dan inklusif.
4. Bagi Pemerintah Daerah: Penelitian ini memberikan masukan strategis bagi Pemerintah Kota Malang dalam merumuskan kebijakan pengelolaan PKL yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip *dynamic governance* dapat dijadikan landasan dalam membangun

sistem tata kelola yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi, serta mendukung tercapainya tata ruang kota yang harmonis antara sektor formal dan informal.



## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan konsep *dynamic governance* dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) telah menunjukkan upaya untuk mewujudkan tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada masa depan. Penerapan tiga dimensi utama *dynamic governance*, yakni *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*, telah mulai terlihat dalam praktik kebijakan. Dimensi *thinking ahead* tercermin dari perencanaan relokasi PKL ke kawasan Pasar Baru Barat, *thinking again* dari pergeseran kebijakan penertiban menjadi pembinaan, serta *thinking across* dari bentuk kolaborasi lintas instansi, seperti Diskopindag, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Namun demikian, implementasi konsep tersebut masih belum optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan data yang akurat, lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta minimnya partisipasi dan pelatihan bagi pedagang. Akibatnya, manfaat kebijakan belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha kecil. Dengan demikian, penerapan *dynamic governance* di Kota Malang perlu diperkuat melalui pengembangan sistem pendataan yang terintegrasi, peningkatan komunikasi publik, perluasan



partisipasi masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar pengelolaan PKL dapat berlangsung secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

## 7.2 SARAN

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian, disarankan agar Pemerintah Kota Malang memperkuat penerapan prinsip-prinsip *dynamic governance* melalui beberapa langkah strategis.

1. Perlu ditingkatkan pelaksanaan sosialisasi dan pelibatan aktif masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima, dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan agar tercipta legitimasi sosial yang kuat dan partisipasi publik yang inklusif.
2. Disarankan agar koordinasi lintas instansi diperkuat melalui penerapan sistem komunikasi dan basis data terpadu yang memungkinkan proses pengawasan dan pengambilan keputusan dilakukan secara cepat, efektif, dan terukur.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal literasi digital dan kemampuan kolaboratif, menjadi penting untuk mendukung birokrasi yang adaptif dan reflektif.
4. Program pembinaan dan pemberdayaan bagi para pedagang perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar mereka memiliki kesiapan sosial dan ekonomi dalam menghadapi perubahan kebijakan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan *dynamic governance* dalam pengelolaan PKL di Alun-alun Kota Malang dapat berkembang menuju tata kelola yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga adil secara sosial, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S.K., 2024. The pillars of trustworthiness in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2, p.100051.
- Ajayi, V.O. (2023) 'A Review on Primary Sources of Data and Secondary Sources of Data', *European Journal of Education and Pedagogy*, 2(3), pp. 1–7. Available at: [www.ej-edu.orgdoi:http://dx.doi.org/19810.21091/](http://www.ej-edu.orgdoi:http://dx.doi.org/19810.21091/).
- Alfianti, N. Z., Purnawati, D., Akmal, F., Rizki, M. F., & Islamiyah, Q. (2019). *Manajemen pelayanan publik* (Hayat, Ed.). DINUN Library & Publishing.
- Alfiyan, M. Y., Afifuddin, A., & Hayat, H. (2019). PERANAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Balongmojo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto). *Respon Publik*, 13(5), 101-109.
- Arifin, A. M., Setyawan, D., Rohman, A., (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Asta, M. N. K., Turrodiyah, L., Ayu, J. P. M., Alisa, S. P., & Ramadhan, D. S. (2019). *Kebijakan dan pelayanan publik* (Hayat, Ed.). DINUN Library & Publishing.

- Banda, L.G. (2024) 'A commentary on Manazir non-linear policy process model', *SN Social Sciences*, 4(12), pp. 1–6. Available at: <https://doi.org/10.1007/s43545-024-01030-4>.
- Dzaky, F., Saroh, S., & Zunaida, D. (2024). STRATEGI BAURAN PEMASARAN 4P PADA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)(Studi Pada PKL Sempol Di Sekitar Alun–Alun Kota Batu). *JIAGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis)*, 13(2), 234-243.
- Finanda, A. S., Fadhila, J. F., & Hayat, H. (2024). Implementasi Prinsip Prinsip Pelayanan Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 74-78.
- Fitriana, R., Auliya, A.U. and Widiyarta, A. (2020) 'Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif', *Jurnal Governansi*, 6(2), pp. 93–103. Available at: <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>.
- Goyal, N. (2021) 'Explaining Policy Success Using the Multiple Streams Framework: Political Success Despite Programmatic Failure of the Solar Energy Policy in Gujarat, India', *Politics and Policy*, 49(5), pp. 1021–1060. Available at: <https://doi.org/10.1111/polp.12426>.
- Hadijah, Z. and Sadali, M.I. (2020) 'Pengaruh Urbanisasi Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(3), pp. 290–306. Available at: <https://doi.org/10.14710/jwl.8.3.290-306>.
- Hayat, H. (2014). Globalisasi Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis Dan

Praktis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean  
2015. *HUNAFa Jurnal Studia Islamika* , 11 (2), 293-314.

Hayat, H. (2016). Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 175-188.

Hayat, H. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Aristo*, 8(1), 1-26.

Hayat, H., & Artisa, R. A. (2019, August). Implementation of public service performance appraisal model. In *First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)* (pp. 49-55). Atlantis Press.

Hayat, H., & Salamah, U. (2019). Hukum Dan Kebijakan Publik. *Refika Aditama*. Diakses pada 25 Februari 2022.

Hayat, H., Rudianto, R., Muchsin, S., & Afifuddin, A. (2023). The implementation of the Regional Development Plan policy focuses on developing the potential of empowered villages in Batu City. *ARISTO*, 12(1), 204-231.

Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Malang: Rajawali Press.

Hayat. (2018). Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi. Malang: Empatdua Media.

HERITAGE KAYUTANGAN KOTA MALANG.

Imayati, S. N., Hayat, H., & Sunariyanto, S. (2023). Kebijakan Publik

Dalam Mendorong Inklusi Sosial Dengan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 211-220.

Jafa, B. J. (2023). *Dynamic governance* Dalam Mengatasi Stunting Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (Doctoral dissertation, IPDN JATINANGOR).

Kamil, M., Roziqin, A., & Rahmawati, Y. (2021). *Dynamic governance* Model Within Integrated Waste Management in Malang City: Agile People And Process In Action. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 312-330.

Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F. and Santoso, E. (2021) 'Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur', *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(3), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16307>.

Lane, J.-E. (2022) 'Authoritative Allocation of Values', *International Business & Economics Studies*, 4(4), p. p1. Available at: <https://doi.org/10.22158/ibes.v4n4p1>.

Larasati, D.C. (2021) 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)', *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), pp. 193–201. Available at: <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>.

Marwiyah, S., Hasan, M.M. Marga, U.P. (2025) 'Implementasi Kebijakan

Pemerintah Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Gresik Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2013', 5, pp. 3908–3914.

Miles, M. B. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE.

Mtisi, S. (2022) 'The Qualitative Case Study Research Strategy as Applied on a Rural Enterprise Development Doctoral Research Project', *International Journal of Qualitative Methods*, 21, pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.1177/16094069221145849>.

Mustafa, G., Yaseen, Z., Arslan, M., Imran, M., & Nisa, Z. U. (2021). Theoretical approaches to study the public policy: an analysis of the cyclic/stages heuristic model. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(10), 1307-1321.

Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore* (English version). World Scientific.

Norman, N. A., Razak, A. R., & Kasmad, R. (2020). *Adaptive Governance Dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Mamuju*. 1 (1), 145–161.

Nurhidayah, R., Nadia, K. H., Oktavia, M. B., Fajar, H. A., & Putri, R. A. K. (2019). *Inovasi dan Kinerja Pelayanan Publik* (Hayat, Ed.). DINUN Library & Publishing.



- Nurizwan, S., & Dewi, U. (2018). *Dynamic governance* Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Resort Pengelolaan Hutan Mangunan Kabupaten Bantul. *Natapraja*, 6(2), 209-220.
- Octaviani, S.L. and Puspitasari, A.Y. (2022) ‘Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima’, *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), p. 130. Available at: <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19991>.
- Putri, M. A., Mefiana, N. S., Ambarwati, P. A., Hermawan, R. P., & Amira, Z. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Alun-Alun Lembang. *Jurnal Pariwisata Dan Perhotelan*, 1(3), 14-14. <https://doi.org/10.47134/pjpp.v1i3.2522>.
- Qomaruddin, Q. dan Sa'diyah, H., 2024. Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), pp.77-84.
- Rahmat, Mochammad Rozikin, Suryadi. 2022. “COLLABORATIVE GOVERNANCE” PEMBANGUNAN KAMPUNG WISATA. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 6, No. 5, Hal. 318-323 |
- Rifai, A., Hayat, H., & Anadza, H. (2025). Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam Optimalisasi Pelayanan Publik:(Studi pada Kantor Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung). *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 6(2), 269-285.

Rizki, M., Sujianto, S. and Asari, H. (2023) 'Kapabilitas *Dynamic governance* Dalam Pembangunan Zona Integritas Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 8(2), pp. 321–338. Available at: <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.5745>.

Rohmah, O.I., 2022. *STRATEGI PEKERJA INFORMAL PERKOTAAN DALAM BERTAHAN HIDUP SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 Studi Kasus Kampung Markisa, Blunyahrejo, Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Septiawan, F.A. and Ubaidillah, L. (2024) 'Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima', *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), p. 12. Available at: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2815>.

Setiadi, R. J., & Subowo, A. (2025). *DYNAMIC GOVERNANCE DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) GRHA TIYASA KOTA BOGOR*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 698-715.

Sibagariang, F. A., Mauboy, L. M., Erviana, R., & Kartiasih, F. (2023) 'Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2022', *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), pp. 151–160. Available at:

<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1892>.

Stouten, J., Rousseau, D.M. and De Cremer, D. (2018) *Successful organizational change: Integrating the management practice and scholarly literatures*, *Academy of Management Annals*. Available at: <https://doi.org/10.5465/annals.2016.0095>.

Syahputri, A.Z., Fallenia, F. Della and Syafitri, R. (2023) 'Kerangka berfikir penelitian kuantitatif', *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), pp. 160–166.

Tefa, G. and Purbosiwi, P.D. (2023) 'Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Tatapamong*, 5(September), pp. 162–176. Available at: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3698>.

Ulfa, N., Fian, S., Hidayatullah, R., Amrullah, J., Putri, A., Ulum, K., Samsih, B. and Astono, T. (2024) 'Strategi Pemerintah Kota Probolinggo Dalam Upaya Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima', 4, pp. 2471–2482.

Wahyundi, B. F. D. (2024). Penerapan E-Government Dalam Mendukung Pelayanan Administrasi Di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang).

Waruwu, M. (2024) 'Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan', *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), pp. 198–211. Available at: <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

- Wei, C. and Dong, Z. 2024. Analysis of the Implementation of Double Reduction Policy Based on Smith Policy Execution Model. *Social Security and Administration Management*, 5(1), pp. 73-77.
- Wijaya, A. A. M., Hanifa, L., Hastuti, H., & Maryasih, L. (2020). Street vendors resiliencies: The role of social capital and community governance. In *Proceedings Aceh Global Conference-Business, Economics, and Sustainable Development Trends* (Vol. 2, pp. 37-41).
- Wilkins, A.W. and Mifsud, D. (2024) ‘What is governance? Projects, objects and analytics in education’, *Journal of Education Policy*, 39(3), pp. 349–365. Available at: <https://doi.org/10.1080/02680939.2024.2320874>.
- Yolawati, Fauzi, A., Alvia, E. T., Adiningsih, A., & Kurniawan, Y. B. (2019). *E-government & e-publik service* (Hayat, Ed.). Akademia Pustaka.

